

**Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program Keluarga  
Harapan (Pkh) Dalam Percepatan Penanggulangan Keluarga  
Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar**

**Nadya Nurul Safira<sup>1</sup>, Akramunnas<sup>2</sup>, Nurfiah Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: <sup>1</sup>[nadyanurulsafira4@gmail.com](mailto:nadyanurulsafira4@gmail.com) , <sup>2</sup>[erossandimahesa@gmail.com](mailto:erossandimahesa@gmail.com) ,  
<sup>3</sup>[nurfiahhanwar05@gmail.com](mailto:nurfiahhanwar05@gmail.com)

**ABSTRAK-** Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya dimasyarakat Negara Berkembang seperti Indonesia. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas disetiap era pemerintahan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada tahun 2007 pemerintah telah membentuk program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kec. Tamalate Kota Makassar pada tahun 2021 berjalan dengan baik, baik melalui distribusi maupun pemerataan kepada masyarakat yang tergolong keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Pendistribusian dana bantuan diterima secara non tunai dan bantuan berupa sembako. Berdasarkan *maqashid syariah*, konsep PKH sudah sesuai dengan syariat islam tergantung pemanfaatannya dari penerima. Konsep PKH sudah mampu memenuhi konsep *maqashid syariah* mulai dari memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan menjaga harta.

**Kata kunci : *Maqashid Syariah*, Program keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin.**

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Hal ini tergantung tidak hanya pendapatan, tetapi juga pada akses ke layanan. Ini termasuk kurangnya penghasilan sumber daya produktif untuk menjamin penghidupan berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, terbatas atau kurangnya akses ke pendidikan dan layanan dasar lainnya, peningkatan morbiditas dan kematian dari penyakit, tunawisma dan perumahan yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, diskriminasi sosial dan eksklusi.<sup>1</sup>

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan seperti, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik mencatat di Indonesia persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Dibanding September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020).<sup>3</sup>

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model

---

<sup>1</sup> Merna Kumalasari, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata – Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah', *Skripsi Universitas Diponegoro*, 2011, 1–130.

<sup>2</sup> Cica Sartika, M.Yani Balaka, and Wali Aya Rumbia, 'Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna', *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1.1 (2016), 106–18.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia, Berita Resmi Statistik* (Jakarta, 2019).

seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam juga menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah swt. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka ini akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah swt..<sup>4</sup>

Ada yang lemah secara ekonomi, yaitu kaum fakir miskin. Ada juga yang lemah secara kasih sayang, yaitu anak yatim dan piatu. Keberadaan mereka di sekeliling kita adalah anugerah Allah yang tidak boleh dikesampingkan. Mereka adalah ladang amal bagi kita yang harus menguatkan dan memberdayakan mereka agar mempunyai kekuatan untuk mandiri. Di saat kita menolong mereka, pasti Allah akan melimpahkan pertolongan-Nya kepada kita.<sup>5</sup>

Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial (*sosial disfunctions*). Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Keluarga miskin tidak semata-mata ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan kondisi di atas, maka pemerintah melalui berbagai elemennya, seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Bappenas serta BUMN juga institusi keuangan bank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> N Fahmi and K Anwar, 'Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan', *Bertuah: Journal of Sharia and ...*, 7.2 (2020),

<sup>5</sup> Francesca Lionetto and others, 'The Impact Of Family Hope Program Policies In Poverty Alleviation In The Banjar District In 2013 – 2018', *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 68.1 (2020), 1–12.

<sup>6</sup> Harry Setiawan, 'Peran Dan Kontribusi Modal Sosial Islami Dalam Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Maqashid Syariah Di Kabupaten Padang Pariaman Dan Kabupaten Solok Sumatera Barat Modal', *Perpustakaan Universitas Airlangga AbstraK*, 3.2 (2013), 1–8.

<sup>7</sup> Muhammad Taufiq Razali and Marita Dwi Putri, 'Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JEJAK)*, 3.2 (2018), 58–70.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. PKH ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama PKH sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>8</sup>

Pada PKH terdapat banyak bimbingan untuk peserta PKH yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta PKH saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri.<sup>9</sup>

Menurut Asy-Syatibi, PKH memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahat diwujudkan untuk kebaikan manusia maupun pada Allah swt. Niat manusia tidak boleh mengikuti nafsu tetapi berdasarkan syariat Allah swt. . Menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi tiga macam, *Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyat*. Maslahat dari dharuriyat meliputi lima yaitu harta benda, menjaga agama, jiwa, keturunan dan intelektual.<sup>10</sup>

Dilihat dari sisi *maqashid syariah*, program ini baik secara keseluruhan. Karena dengan meningkatnya kesehatan dan Pendidikan itu akan menyebar ke yang lain, seperti spiritual, turun temurun dan kekayaan manusia. Makna pemberdayaan manusia dalam islam adalah keseimbangan antara dunia dan keabadian yang dilengkapi dengan ukhuwah dan taqwa kepada Allah swt. . Secara maliyah atau materi, dibagi menjadi tiga hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, kemandirian masyarakat dan rasa kedaulatan dalam masyarakat untuk menunjukkan pemberdayaan dalam masyarakat itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Grace Leliharni Damanik, 'Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Selayang', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6.1 (2019), 23–30.

<sup>9</sup> Lilik Irmawati, 'Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Skripsi', *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 4.2 (2016), 130–54.

<sup>10</sup> Nur Isna, 'Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020 .

Dan di sisi Madhiyah atau Spiritual, di mana orang dapat memenuhi kewajibannya dalam agama dan kenyamanan dengan yang lain.<sup>11</sup>

## **TINJAUAN LITERATUR**

### ***Maqashid Syariah***

Maqashid syari'ah merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai melalui perbuatan hukum sesuai syariat sehingga mampu mencapai kemaslahatan bagi manusia. Maqashid Syari'ah menjadi sebuah model pendekatan melalui ijtihad dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penentuan ilmu fikih muamalah. Ali Yasa' mengungkapkan jika maqashid syari'ah perlu menjadi pertimbangan atas segala penalaran yang dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan. Sementara menurut alSyatibi yang dikenal sebagai bapak maqashid al-syari'ah, mengungkapkan jika Allah swt senantiasa menurunkan syariat secara tidak sia-sia melainkan untuk memberikan petunjuk bagi manusia di dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

### ***Program Keluarga Harapan***

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pengentasan kemiskinan dan posisi PKH menjadi bagian dari program pengurangan kemiskinan lainnya. PKH memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) jika melengkapi persyaratan tersebut terkait peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan terutama pada keluarga miskin<sup>13</sup>

### ***Keluarga Miskin***

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang di hubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan social dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola

---

<sup>11</sup> C. Usman, 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi Di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo).', *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2.001 (2014), 1200.

<sup>12</sup> Muhammad Toruquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.1 (2014), 67-81.

<sup>13</sup> Patia Sopa, 'Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung) Skripsi', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 6.2 (2019), 121-30.

interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan Bersama. Miskin adalah keadaan dimana tidak memiliki harta benda atau serba kekurangan.<sup>14</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***PKH dalam Meningkatkan Taraf Hidup dan Pendapatan Keluarga Miskin Kecamatan Tamalate***

Berdasarkan hasil wawancara, bantuan PKH mampu meningkatkan taraf hidup para penerima bantuan secara berangsur-angsur. Beberapa penerima bantuan PKH mampu memanfaatkan untuk membuka usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga. PKH tidak hanya memberi bantuan berupa uang, namun juga mampu mengajarkan penerima untuk menyejahterakan keluarga tanpa harus bergantung terus pada bantuan dari Kemensos.

penulis menggambarkan secara nyata tentang pengaruh pembinaan keluarga miskin yang sangat membantu secara ekonomi dari seluruh proses kehidupan masyarakat di Kec. Tamalate Kota Makassar. Selain itu, telah terlahir kembali semangat menuntut ilmu dari para orang tua untuk anak-anak mereka agar bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas dan bermartabat. Oleh sebab itu, PKH telah berhasil menyelamatkan keluarga miskin secara finansial.

#### ***PKH dalam Menanggulangi Keluarga Miskin Perspektif Maqashid Syariah***

Masyarakat pada Kec. Tamalate sudah merasa kebutuhan dharuriyyat nya terpenuhi baik itu dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta. Melalui program P2K2 dari PKH tersebut mampu mengajarkan dari aspek-aspek yang ada pada dharuriyyat. Memelihara akal (*hifzu aql*) tersebut dapat dikaitkan dengan pendidikan pada PKH, meski pendidikan tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh setiap umat manusia demi memperbaiki pola tatanan hidup, namun tanpa dengan pendidikan manusia juga bisa berbuat sesuatu dalam kehidupannya, manusia bisa berpikir apa yang mereka harus lakukan melalui pemikiran mereka.

---

<sup>14</sup> Ninik Handayani, 'Menyimak Kehidupan Keluarga "Miskin"', *Jurnal Analisis Sosial*, 14.2 (2009), 1–12.

Tatanan manusia berbeda-beda yang telah digariskan oleh Allah swt. ada yang kaya dan ada yang miskin, yang kaya bisa saja melanjutkan pendidikan mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan itu bukan suatu keharusan apabila manusia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi yang miskin yang hanya sebatas untuk beli makanan, pakian, juga tidak sampai diharuskan berpendidikan yang tinggi karena itu bisa saja menyiksa diri umat manusia (*hifzu nafs*). Dalam PKH bukanlah suatu bantuan yang dipakai untuk bermewah-mewahan karena bantuan tersebut merupakan bantuan bagi rumah tangga yang sangat miskin. Bantuan untuk pendidikan agar bisa merubah moral dan etika masyarakat, karena kadang kemiskinan menjadikan manusia itu mempunyai moral yang kurang baik dan etika yang kurang baik tidak sesuai dengan ajaran agama utamanya agama Islam contohnya mencuri, dan berbicara yang kurang sopan kepada yang lebih tua dari mereka dan berbuat jahat kepada yang lebih muda dari mereka, serta sesuai dengan pancasila dalam sila ke 3 (tiga) kemanusiaan yang adil dan beradab (*hifzu addin*). Dengan mempunyai pendidikan yang bisa merubah moral dan etika mereka. Itulah yang menjadi utama dalam pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan utamanya pada Kec. Tamalate Kota Makassar.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) di Kec. Tamalate Kota Makassar pada tahun 2021 berjalan dengan baik, baik melalui distribusi maupun pemerataan kepada masyarakat yang ada di Kec. Tamalate yang tergolong keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Pendistribusian dana bantuan Program keluarga Harapan di Kec. Tamalate Kota Makassar pada tahun 2021 diterima secara non tunai di Bank BRI terdekat melalui rekening masing-masing peseta PKH dan bantuan berupa sembako melalui pendamping PKH yang ditempatkan pada daerah masing-masing.

Berdasarkan *maqashid syariah*, penetapan sasaran penerima bantuan yaitu Penetapan sasaran program keluarga harapan sangat memperhatikan dan mengutamakan perempuan dalam hal ini ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam bidang kesehatan. Hal ini merupakan gambaran salah satu bagian dari *maqashid syariah* yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Program kerja PKH yaitu P2K2 yang merupakan program kerja untuk mengsosialisasikan bagaimana menyejahterahkan keluarga mampu membantu keluarga keluar dari kata miskin. Program tersebut banyak mengajarkan tentang kehidupan. Sudah termasuk urusan agama dan pendidikan. Hal ini merupakan gambaran salah satu bagian dari *maqashid*

syariah yaitu memelihara akal. Penyaluran bantuan PKH memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang. Gambaran diatas sesuai dengan maqashid syariah poin menjaga harta yaitu melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia, Berita Resmi Statistik* (Jakarta, 2019)
- Damanik, Grace Leliharni, 'Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Selayang', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6.1 (2019), 23–30
- Fahmi, N, and K Anwar, 'Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Beranah Kecamatan Bantan', *Bertuah: Journal of Sharia and ...*, 7.2 (2020), 172–89
- Handayani, Ninik, 'Menyimak Kehidupan Keluarga "Miskin"', *Jurnal Analisis Sosial*, 14.2 (2009), 1–12
- Harry Setiawan, 'Peran Dan Kontribusi Modal Sosial Islami Dalam Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Maqashid Syariah Di Kabupaten Padang Pariaman Dan Kabupaten Solok Sumatera Barat Modal', *Perpustakaan Universitas Airlangga Abstrak*, 3.2 (2013), 1–8
- Irmawati, Lilik, 'Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Skripsi', *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 4.2 (2016), 130–54
- Kumalasari, Merna, 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata – Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah', *Skripsi Universitas Dipenogoro*, 2011, 1–130
- Lionetto, Francesca, Silvio Pappadà, Giuseppe Buccoliero, Alfonso Maffezzoli, Zbigniew Marszałek, Ryszard Sroka, and others, 'The Impact Of Family Hope Program Policies In Poverty Alleviation In The Banjar District In 2013 – 2018', *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 68.1 (2020), 1–12
- Nur Isna, 'Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020



<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- Razali, Muhammad Taufiq, and Marita Dwi Putri, 'Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JEJAK)*, 3.2 (2018), 58–70
- Sartika, Cica, M.Yani Balaka, and Wali Aya Rumbia, 'Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna', *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1.1 (2016), 106–18
- Sopa, Patia, 'Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung) Skripsi', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 6.2 (2019), 121–30
- Toruquddin, Muhammad, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.1 (2014), 67–81
- Usman, C., 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi Di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo).', *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2.001 (2014), 1200